

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA UNTUK TIDAK BERGABUNG DALAM TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT (TPP) DI ASIA PASIFIK TAHUN 2011

Ratnawilis* & Indra Pahlawan, S.IP, M.Si*
Ratnawilis309@yahoo.co.id

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru 28293

Abstract

This research is a qualitative research by conducting literature review and compiling data from books, journal and the website. It's explains about Indonesia's rejection on trans-pacific partnership (TPP) agreement in 2011. TPP Agreement is a concept free trade in Asia Pasifik with the highest rules-based 21st century. TPP Agreement is an agenda of America that was submitted on KTT-19 APEC in Honolulu, Hawaii Amerika Serikat. It's on 2010-2011 has nine partner's members, they are Singapore, New Zealand, Chili, Brunei Darussalam, United State, Vietnam, Peru, Australia, and Malaysia. In analyzing all members of TPP are the members of APEC in 2011. According to Indonesia's ministry of commerce, Gita Wirjawan, Indonesia as APEC's members rejects to join on TPP agreement. This Indonesia's rejection on TPP agreement is influenced by interest group so that this research uses bureaucratic politics theory. Some of interest group in Indonesia support the rejection on TPP. This research shows that Indonesia does not join on TPP agreement because Indonesia has been involved in free trade diplomacy with ASEAN such as ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), ASEAN Community 2015.

Keywords: *Indonesia, Trans-pacific Partnership Agreement (TPP), Bureaucratic Politics, Interest Groups, Free Trade Agreement*

*Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP UR Angkatan 2011

*Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP UR Angkatan 2011

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi hubungan internasional yang meneliti tentang kepentingan Indonesia untuk tidak bergabung dalam *Trans-pacific Partnership Agreement* (TPP) di Asia Pasifik tahun 2011.

Penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta penolakan Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian TPP di Asia Pasifik tahun 2011. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dan metode *library research*. Penulis memberikan batasan waktu untuk memberikan fokus yang lebih tajam. Penulis menggunakan rentang waktu tahun 2011 karena pada saat itu Indonesia melakukan penolakan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan.

Latar Belakang Masalah

Perjanjian *Trans-pacific Partnership* (TPP) atau Kemitraan Trans Pasifik merupakan suatu konsep perdagangan bebas dalam sektor barang, jasa dan investasi dan menjadikan lautan pasifik sebagai perputaran perdagangan.¹ Kemitraan diartikan sebagai teman atau rekan kerja yang berarti setiap negara anggota yang bergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik saling bekerja sama dalam konsep perdagangan bebas yang diatur oleh Kemitraan Trans Pasifik.

Perjanjian TPP berawal dari pembentukan *Pacific Four* (P4) yang ditandai dengan penandatanganan MOU Kerjasama Buruh dan Perjanjian Kerjasama di Wellington oleh 4 negara yaitu Singapura,

Chile, Selandia Baru dan Brunei Darussalam yang berlaku pada 28 Mei 2006. Pada tahun 2008, Vietnam, Peru dan Australia bergabung namun Amerika Serikat baru menunjukkan ketertarikan. Amerika Serikat resmi bergabung pada 14 Desember 2009.² Pada tahun 2010, Malaysia bergabung dalam *Pacific Four* (P4) dan P4 diganti menjadi *Trans-pacific Agreement* (TPP) sebagai bentuk negosiasi baru. Pada tahun 2010 hingga 2011, Perjanjian TPP mempunyai 9 negara mitra yang keseluruhannya merupakan anggota APEC. Kesembilan negara mitra TPP merupakan anggota *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC).

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (*US Representative*) tahun 2011 memandang kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan pasar Amerika dalam perdagangan internasional karena produk ekspor ke kawasan tersebut mencapai US\$ 775 miliar atau 61% dari total ekspor Amerika ke berbagai negara di dunia. Keterlibatan Amerika Serikat dalam *Trans-pacific Partnership* (TPP) di Asia Pasifik membuat Amerika Serikat menjadikan perjanjian TPP sebagai prioritas utama negaranya untuk meningkatkan ekspor, melindungi sektor bisnisnya diluar negeri, dan menciptakan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat.³ Hal ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat pada KTT-19 APEC di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat “ *We just had an excellent meeting and I’m very pleased to announce that our nine nations have reached the*

¹ “Kemitraan Trans Pasifik, Fokus Utama Forum APEC di Bali” Voice of America 2013. Tersedia di: <<http://www.voaindonesia.com/content/tpp-fokus-utama-forum-apec-di-bali/1748844.html>> [Diakses 31 Oktober 2014 pukul 14:30]

² New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade. “*Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : Understanding The P4-The Original Agreement*”. Tersedia di <<http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/Trans-Pacific/0-history.php>> [Diakses pada 15 November 2014 pukul 23:38]

³ Hadiedi Prasaja “*Membangun ASEAN Sebagai Kawasan Berdaulat*” Serikat Petani Indonesia Tersedia di <<http://www.spi.or.id/?p=4443>> [Diakses tanggal 04 Desember 2014 pukul 12:50]

broad outlines of an agreement. There are still plenty of details to work out, but we are confident that we can do so. So we've directed our teams to finalize this agreement in the coming year. It is an ambitious, but we are optimistic that we can get it done. The TPP will boost our economies, lowering barriers to trade and investment, increasing export, and creating more jobs for our people, which is my number-one priority. Along with our trade agreements with South Korea, Panam dan Colombia, the TPP will also help achieve my goal of doubling U.S.exports, which support millions of American jobs".⁴

Berdasar pada keinginan tersebut, Amerika Serikat aktif menawarkan perjanjian TPP ke berbagai negara terutama negara anggota APEC termasuk Indonesia pada pertemuan KTT-19 APEC di Hotel Trump Waikiki, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat tanggal 12-13 November 2011. Indonesia sebagai anggota APEC namun menolak untuk bergabung yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Gita Wirjawan. Penolakan yang dilakukan oleh Gita ini didukung oleh Menteri Keuangan Indonesia serta kelompok-kelompok kepentingan Indonesia seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.

Kajian Politik Birokrasi Graham T. Alison

Kepentingan nasional merupakan konteks yang memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan hal yang membaasi dalam pengambilan keputusan.⁵ Pemerintah atau aktor-aktor rasional mengambil keputusan dalam politik luar negeri berdasar pada kepentingan nasional.

Dalam memudahkan penelitian, dibutuhkan teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan tingkat analisa negara bangsa bahwa dalam hubungan internasional negara bangsa merupakan aktor utama dalam pembuatan keputusan.⁶ Perspektif yang penulis gunakan adalah realis yang memandang bahwa tidak ada hubungan kerjasama, yang ada hanyalah kepentingan dan meninggikan nilai-nilai nasional negara yang menganggap hubungan kerjasama anarki dan menyebabkan konflik.⁷ Dalam perspektif realis tidak mempercayai hubungan kerjasama karena disamping kerjasama tersebut terdapat kepentingan-kepentingan pribadi sehingga dapat menyebabkan konflik.

Graham T. Allison mempunyai 3 model pembuatan kebijakan luar negeri yaitu Aktor Rasional (*Rational Actor*), Proses Organisasi (*the Organizational Process*), dan Politik Birokrasi/Pemerintahan (*Bureaucratic/Governmental Politics*).⁸ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perumusan Graham T. Allison melalui pendekatan Politik Birokrasi/Pemerintahan (*Bureaucratic/Governmental Politics*) dengan melihat penyebab Indonesia tidak bergabung dalam perjanjian *Trans-pacific Partnership* (TPP) yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok birokrasi dan organisasi yang ada di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan Model Politik Birokrasi/Pemerintahan (*Bureaucratic/Governmental Politics*) Graham T. Allison. Dalam Model Politik Birokrasi, individu dari kelompok

⁴ President Obama at The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Tersedia di <http://www.whitehouse.gov/blog/2011/11/13/presiden-t-obama-asia-pacific-economic-cooperation-apec> [Diakses 21 November 2014 pukul 22:47]

⁵ Finnemore M. 1996, "*Interest In International Society*" New York: Cornell University Press hlm 2

⁶ Mochtar Mas'oed, "*Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*", LP3ES, Cet.2 (edisi revisi), Jakarta, 1994, hlm 41

⁷ "*Thucydides dan Prinsip Realisme*" Tersedia di <http://ir.binus.ac.id/2012/08/02/thucydides-dan-prinsip-realisme/> [Diakses pada 07 Desember 2014 pukul]

⁸ Hara, Abubakar E., 2011, "*Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme*" Bandung: Penerbit Nuansa hlm 97

kepentingan organisasi memiliki peran dan terlibat dalam proses pencapaian keputusan sehingga menjadi suatu kebijakan negara.

Berdasar pada teori yang digunakan, Indonesia tidak bergabung dalam perjanjian TPP dilihat dari pertimbangan yang dilakukan oleh aktor negara dengan adanya dukungan dari kelompok kepentingan negara karena keputusan yang diambil mempunyai dampak yang kuat terhadap kondisi kelompok kepentingan.

Perjanjian *Trans-pacific Partnership* (TPP) dalam Konteks Diplomasi Perdagangan Indonesia

Perjanjian *Trans-pacific Partnership* (TPP) sebelumnya dikenal dengan nama *Pacific Three Closer Economic Partnership* (P3CEP) atau Tiga Kemitraan Ekonomi Dekat Pasifik. Perjanjian ini dibentuk oleh tiga negara yaitu Chile, Singapura dan Selandia Baru diluar pertemuan Pemimpin APEC pada tahun 2002 di Los Cabos, Meksiko. Chile diwakili oleh Presiden Richardo Lagos, Singapura diwakili oleh Perdana Menteri Singapura Gho Chok Tong dan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark merumuskan suatu bentuk liberalisasi perdagangan di Asia Pasifik. Brunei Darussalam bergabung dalam P3CEP sehingga kesepakatan ini disebut dengan *Pacific Four* (P4) pada pertemuan Menteri Perdagangan APEC di Jeju, Korea Selatan pada 3 Juni 2005.⁹ Perjanjian TPP berawal dari terbentuknya P3CEP oleh Chile, Singapura dan Selandia Baru pada tahun 2002

dan disusul dengan kesepakatan P4 setelah Brunei Darussalam bergabung.

Kesepakatan P4 ditandai dengan penandatanganan MOU Kerjasama Buruh dan Perjanjian Kerjasama di Wellington oleh Perwakilan Selandia Baru, Chili dan Singapura pada 28 Juli 2005 sedangkan Brunei Darussalam baru menandatangani pada 2 Agustus 2005. Kesepakatan tersebut mulai berlaku untuk Selandia Baru dan Singapura pada 28 Mei 2006 sedangkan untuk Brunei mulai berlaku pada 12 Juli 2006 dan Chile mulai berlaku pada 8 November 2006.¹⁰ Kesepakatan P4 dibentuk pada tahun 2005, namun mulai berlaku pada tahun 2006 dengan penandatanganan MOU Kerjasama Buruh dan Perjanjian Kerjasama di Wellington

Pada 30 Desember 2008, kemitraan P4 bertambah dengan bergabungnya Peru, Vietnam dan Australia. Pasca pergantian Presiden Amerika Bush dengan Obama, pada 14 Desember 2009 Obama menyatakan keterlibatannya dengan perjanjian P4.¹¹ Amerika Serikat menampakkan niatnya untuk bergabung dalam perjanjian P4 tahun 2008 dan resmi bergabung tahun 2009 pada pemerintahan Obama. Pada tahun 2009, P4 memiliki 8 mitra, yaitu: Singapura, Chile, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Amerika Serikat, Vietnam, Peru dan Australia.

Perundingan pertama perjanjian P4 diadakan pada bulan Maret 2010 di Melbourne, Australia dengan 8 negara kemitraan. Selama tahun 2010, P4 melakukan empat putaran perundingan. Pada putaran perundingan keempat negara mitra P4 bertambah dengan bergabungnya Malaysia pada Oktober 2010. Pada tahun 2010, *Pacific Four* (P4) berganti nama menjadi *Trans-pacific Partnership* sebagai bentuk perluasan

⁹ New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade. “*Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : Understanding The P4-The Original Agreement*”. Tersedia di <http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/Trans-Pacific/0-history.php> [Diakses pada 15 November 2014 pukul 23:38]

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Fergusson, I.F., Vaughn B., *The Trans-Pacific Partnership Agreement*. Congressional Research Service. 12 Desember 2011

mitra.¹² Perundingan pertama TPP yang sebelumnya disebut P4 diikuti 8 negara mitra TPP. Pasca Malaysia bergabung, anggota mitra TPP berjumlah 9 negara anggota. Kemitraan negara P4 atau *Trans-pacific Partnership* pada tahun 2010 hingga 2011 berjumlah 9 negara mitra TPP dan telah melakukan empat putaran perundingan selama tahun 2010.

Tabel 1: Negara-negara Mitra *Trans-pacific Partnership* (TPP)

No	Nama Negara	Status Keanggotaan	Mulai Bergabung	Keterangan
1	Brunei Darussalam	Bergabung / <i>Original Signatory</i>	28 Mei 2006	Telah bergabung dalam P4 sebelumnya
2	Chile	Bergabung / <i>Original Signatory</i>	28 Mei 2006	Telah bergabung dalam P4 sebelumnya
3	Selandia Baru	Bergabung / <i>Original Signatory</i>	28 Mei 2006	Telah bergabung dalam P4 sebelumnya
4	Singapura	Bergabung / <i>Original Signatory</i>	28 Mei 2006	Telah bergabung dalam P4 sebelumnya
5	Australia	Ikut bergabung / <i>Negotiating</i>	20 November 2008	
6	Peru	Ikut bergabung / <i>Negotiating</i>	November 2008	
7	Vietnam	Ikut bergabung / <i>Negotiating</i>	Tahun 2009	
8	Malaysia	Ikut bergabung / <i>Negotiating</i>	Oktober 2010	
9	Amerika Serikat	Ikut bergabung /	14 Desember	

¹² *Ibid*

		<i>Negotiating</i>	2009	
--	--	--------------------	------	--

Sumber: diolah dari Jurnal Kajian Wilayah PSDR LIPI

Pada APEC di Honolulu, 9 mitra pemimpin TPP menyetujui kesepakatan regional TPP dengan penetapan standar perjanjian untuk 5 bidang utama, yaitu:

1. Akses Pasar Komprehensif (*Comprehensive Market Acces*), yaitu penghapusan hambatan tarif dan non-tarif pada barang, jasa perdagangan dan investasi.
2. Perjanjian Regional (*Regional Agreement*), yaitu memberikan fasilitas perdagangan dan pengembangan produksi agar terciptanya lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup.
3. *Cross-Cutting Trade Issues*, yaitu perjanjian untuk wilayah tertentu mengenai fasilitas bisnis, persaingan, usaha kecil dan menengah dan pembangunan. *Koherensi Regulatory* (komitmen untuk mempromosikan perdagangan antar negara-negara), Daya Saing dan Fasilitas Bisnis (komitmen untuk meningkatkan daya saing perekonomian domestik dan regional, integrasi ekonomi dan lapangan kerja), Usaha Kecil dan Menengah / UKM (komitmen untuk mengatasi masalah kecil dan menengah perusahaan), Pembangunan (meningkatkan perdagangan dan investasi).
4. Tantangan Perdagangan Baru, yaitu mempromosikan perdagangan dan investasi dengan layanan baru.

5. Kesepakatan Hidup (*Living Agreement*), yaitu pembaharuan perjanjian untuk mengatasi munculnya masalah perdagangan di masa depan serta perluasan perjanjian untuk memasukkan negara-negara baru.¹³

Kebijakan diplomasi perdagangan Indonesia pada tahun 2011 terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II 2010-2014 butir 3.3.2 yang berisikan bahwa “mendorong pemanfaatan berbagai skema perdagangan dan kerjasama perdagangan yang menguntungkan kepentingan nasional”.¹⁴ Indonesia harus mampu mengukur dampak keuntungan dan kerugian apabila bergabung dalam suatu perjanjian perdagangan untuk kepentingan nasional. Dalam penawaran perjanjian *Trans-pacific Partnership* (TPP) terhadap Indonesia, pemerintah Indonesia sesuai dengan kebijakan diplomasi perdagangan Indonesia yang mengacu pada RPJMN II 2010-2014 dengan mendorong pemanfaatan berbagai skema perdagangan yang menguntungkan kepentingan nasional. Penolakan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan menggambarkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam perjanjian *Trans-pacific Partnership* (TPP) di Asia Pasifik tidak termasuk kepentingan nasional Indonesia pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, Indonesia mempunyai kepentingan nasional yaitu diplomasi perdagangan Indonesia dengan ASEAN

seperti *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA), *ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) dan *ASEAN Community*. Hubungan diplomasi perdagangan Indonesia dengan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dibuktikan dengan peratifikasian *Ratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA* pada 15 Juni 2004 melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Pemberlakuan perdagangan bebas Indonesia dengan ACFTA mulai berlaku pada tahun 2010 dalam pemberlakuan untuk ASEAN-6 yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Philipina.

Tujuan ACFTA adalah meliberalisasi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan kerjasama ekonomi. Hal yang penting dalam liberalisasi perdagangan adalah penurunan atau menghilangkan tarif bea masuk. Penurunan tarif ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu *Early Harvest Program* (EHP), *Normal Track*, *Sensitive Track*. EHP merupakan tahap awal penurunan tarif impor tahap secara bertahap dari tahun 2004 hingga 2006. *Normal Track* merupakan penurunan tarif secara bertahap tarif impor yang tergolong kriteria produk *Normal Track* hingga tahun 2010. *Sensitive Track* mulai berlaku pada tahun 2012, dan *sensitive* produk yang mulai berlaku pada tahun 2018.¹⁵ Penurunan tarif bertahap ini dimulai dari tahun 2004 hingga 2018 berlaku untuk anggota yang menyepakati ACFTA.

Keberadaan perdagangan bebas memberikan kemudahan dalam ekspor-impor antara Indonesia dengan China. Produk yang diimpor China ke Indonesia salah satunya merupakan produk unggulan domestik Indonesia yaitu tekstil dan produk tekstil sehingga produk tekstil dalam negeri

¹³ Fergusson, I.F., Cooper, W. H., Jurenas, R., & Williams, B. R, *Op Cit*

¹⁴ Tabloid Diplomasi “*Diplomasi Perdagangan Multilateral*” Tersedia di <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/157-juli-2011/1152-diplomasi-perdagangan-multilateral.html> [Diakses pada 05 Desember 2014 pukul 12:59]

¹⁵ ILO Office for Indonesia. 2013 *Analisis Simulasi Social Accounting Matrix (SAM) dan The Smart Model*. Jakarta: ILO hlm 16

Indonesia bersaing dengan impor tekstil China. Produk tekstil China memiliki 15% dan 25% harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk domestik Indonesia. China memiliki industri tekstil yang terintegrasi dengan bahan baku, mesin pertekstilan dan bahan jadi sedangkan untuk bahan baku Indonesia mengimpor dari Bangladesh, India dan Pakistan sehingga menyebabkan produk Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan produk China.¹⁶ China dengan ketersediaan bahan baku bisa menjual produknya dengan harga yang lebih murah di luar negaranya apalagi dengan sedikit biaya impor ke negara-negara yang terikat dengan ACFTA.

Pada tahun 2010, penjualan produk tekstil lokal di pasar domestik mencapai 13,5 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu menjadi US\$ 7,6 miliar. Faktor penyebab penurunan penjualan produk tekstil ini adalah upah buruh yang mengalami kenaikan 22% dan naiknya tarif listrik. Kenaikan upah buruh dan listrik, penurunan disebabkan oleh daya konsumtif masyarakat Indonesia yang lebih menyukai produk luar negeri dari pada produk domestik.¹⁷ Penurunan daya beli produk tekstil domestik Indonesia disebabkan karena kenaikan upah buruh, tarif listrik serta daya konsumtif masyarakat yang lebih menyukai produk luar negeri.

Berdasar database CEIC, jumlah ekspor Indonesia ke China adalah sebanyak US\$ 18,2 miliar pada periode Januari-Oktober 2011 yang mengalami kenaikan sebesar 57% dari US\$ 11,6 miliar pada 2010. Disamping itu, impor Indonesia dari China mencapai US\$ 21,4 miliar pada periode Januari-Oktober 2011. Impor mengalami peningkatan sebesar

29% dibandingkan US\$ 16,6 miliar pada 2010. Nilai ekspor Indonesia ke China hingga akhir 2011 sebesar US\$ 21,9 miliar sedangkan nilai impor sebesar US\$ 25,7 miliar sehingga Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar US\$ 3,8 miliar pada tahun 2011.¹⁸ Berdasar data yang ada pada 2011, perdagangan Indonesia mengalami defisit dengan China karena nilai ekspor Indonesia ke China lebih sedikit daripada nilai impor. Hubungan kerjasama Indonesia dengan China meningkat dengan bertambahnya nilai ekspor ke China dari tahun 2010 di tahun 2011.

Dampak kerjasama Indonesia dengan ACFTA dalam bidang pekerjaan pada tahun 2009 adalah hilangnya 297.000 pekerjaan, namun mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 225.000. Sektor-sektor yang mendapat dampak negatif kerjasama impor Indonesia dengan ACFTA adalah pabrik kertas dan mesin, tekstil dan garmen.¹⁹ Kerjasama Indonesia dengan ACFTA memberikan dampak terhadap keadaan tenaga kerja Indonesia pada tahun 2009. Keberadaan produk impor yang tinggi di Indonesia menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Indonesia sebagai anggota ASEAN, telah meratifikasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 mengenai Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (*Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand-Free Trade Area*) dan penetapan tarif bea masuk yang diatur oleh PMK No. 166

¹⁶ Hartono Rudi "Pengaruh Kerjasama ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Pasar Domestik Produk Tekstil Indonesia (2010-2012)"

ejournal Ilmu Hubungan Internasional Vol 1 No 4 2013

¹⁷ Ibid

¹⁸ Setiawan Sigit "ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia dan China" Buletin Ilmiah Perdagangan Vol.6 No.2 Desember 2012

¹⁹ ILO. "Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China-Peluang atau Tantangan" Tersedia di http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_159626.pdf [Diakses pada 06 Desember 2014 pukul 13:39]

Tahun 2011.²⁰ Indonesia telah meratifikasi persetujuan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas AANZFTA dan telah menetapkan tarif bea masuk melalui PMK No. 16 Tahun 2011.

Indonesia dalam kesepakatan *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement* menghapus 93,17 % tarif yang berlaku pada 2009 hingga 2020. Sementara itu, mulai 2009 hingga 2015 Australia menghapus seluruh bea masuk dan Selandia Baru menghapus sebanyak 90% bea masuk pada 2012. Dalam kerjasama tersebut, Australia memberikan pembukaan pasar produk otomotif, pengembangan kapasitas industri otomotif, bantuan sertifikasi produk makanan, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja pipa minyak dan gas serta bantuan tenaga pengajar Bahasa Inggris. Selandia Baru mengadakan pembukaan pasar daging sapi dan produk susu serta kerjasama dalam keamanan pangan.²¹ Dalam AANZFTA, Indonesia, Australia dan Selandia Baru masing-masing negara menetapkan pengurangan serta penghapusan tarif untuk bea masuk. Dengan pengurangan tarif tersebut dapat melancarkan proses ekspor-impor negara-negara tersebut.

Indonesia merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 Australia pada Januari hingga November 2011. Total perdagangan Indonesia dan Australia pada Januari hingga November 2011 mengalami kenaikan 30,55% yaitu sebesar US\$ 10.684,34 juta. Nilai impor Indonesia sebesar US\$ 5.127,29 juta

sedangkan ekspor sebesar US\$ 5.557,05 juta sehingga Indonesia mengalami surplus sebesar US\$ 429,77 juta. Kesepakatan AANZFTA memberikan dampak positif bagi hubungan dagang antara Indonesia dengan Australia karena kedua negara tersebut bisa meningkatkan perdagangan, ekonomi dan investasi dengan lebih mudah. Tarif impor dari Australia ke Indonesia mendapatkan bebas bea masuk sebesar 92% sedangkan ekspor Indonesia bebas bea masuk sebesar 99%.²² Kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia memberikan dampak positif bagi Indonesia dengan nilai perdagangan yang surplus pada 2011.

Tabel 2 : Data Ekspor Komoditi Utama Indonesia ke Australia (periode Januari-November 2011)

<i>Dalam juta USD</i>			
No	Komoditi	Nilai	Pangsa
1	<i>Gold (Incl Plat Plated), Unwr, Semimfr or Powder</i>	373,95	12,43
2	<i>Wood, Continously Shaped</i>	114,17	3,79
3	<i>New Pneumatic Tires, of Rubber</i>	98,92	3,29
4	<i>Video Recording/Reproduc Appar Whet/Nt Video Turner</i>	53,63	1,78
5	<i>Insulated Wire, Cable</i>	38,12	1,27
6	<i>Furniture Nesoi, and Parts Thereof</i>	37,23	1,24
7	<i>Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Woods</i>	33,63	1,12
8	<i>Coffe, Coffe Husks</i>	25,70	0,85
9	<i>Trans Appar for Radiotele ; TV and Camera</i>	22,68	0,75
10	<i>Ammonia, Anhydrous or in Aqueous Solution</i>	22,60	0,75
Total ekspor ke Australia		5.557,05	
Total ekspor migas ke Australia		2.548,33	

²⁰ “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011”. Tersedia di <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/166~PMK.011~2011Per.HTM> [Diakses pada 02 Desember 2014]

²¹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “Perundingan Perdagangan Bebas RI-Selandia Baru Dilanjutkan Maret” Tersedia di <http://www.kemenperin.go.id/artikel/701/Perundingan-Perdagangan-Bebas-RI---Selandia-Baru-Dilanjutkan-Maret> [Diakses pada 02 Desember 2014 pukul 21:30]

²² Tabloid Diplomasia. “Perdagangan Indonesia-Australia”. Tersedia di <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/169-maret-2012/1367-perdagangan-indonesia-australia.html> [Diakses pada 02 Desember 2014 pukul 17:17]

Total ekspor non migas ke Australia	3.008,72
-------------------------------------	----------

Sumber: diolah dari www.kemendag.go.id/files

Diplomasi perdagangan Indonesia dengan Selandia Baru dibuktikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam Industri Pertanian oleh Menteri Industri Primer Selandia Baru David Carter dan Indonesia pada tahun 2012. Dalam nota tersebut, membahas mengenai program peningkatan kapasitas industri pengolahan susu di Indonesia, bantuan ekspor holtikultura Indonesia ke Selandia Baru, program studi banding untuk mempelajari penghasil daging sapi serta produk susu di Selandia Baru.²³ Hubungan kerjasama perdagangan pada tahun 2011 memberikan dampak positif sehingga kedua negara tersebut membentuk Nota Kesepakatan Kerjasama dalam Industri Pertanian pada tahun 2012.

Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2011, mengadakan pertemuan *ASEAN Foreign Ministers (AMM) Retreat* di Hotel Oberoi, Lombok pada 16 hingga 17 Januari 2011. Ketua rangkaian *AMM Retreat* adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. R.M. Marty M. Natalegawa. Pokok pembahasan pada pertemuan tersebut yaitu *Pertama*, tahun 2011 ditandai dengan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN. *Kedua*, memelihara tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan dan *ketiga* perlunya visi ASEAN pasca 2015 (*ASEAN Beyond 2015*) yaitu peranan masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia (*ASEAN Community in a global community of nations*).²⁴ Pertemuan pertama keketuaan Indonesia di ASEAN adalah *ASEAN Foreign Ministers*

²³ *Ibid*

²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia "Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM Retreat, Lombok, 16-17 Januari 2011" Tersedia di <<http://kemlu.go.id/layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseLike.aspx?l=id&ItemId=4a226a31-40bf-4935-bfe7-dc117907def9>> [Diakses pada 03 Desember 2014 pukul 01:28]

(AMM) yang diadakan di Lombok pada 16 hingga 7 Januari 2011.

Pemerintah dan Kelompok Kepentingan Indonesia Menyikapi Penawaran Keanggotaan *Trans-pacific Partnership* (TPP) di Asia Pasifik Tahun 2011

Kemitraan Trans Pasifik atau *Trans-pacific Partnership* (TPP) ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Obama pada KTT APEC ke-19 di Hotel Trump Waikiki, Honolulu, Amerika Serikat pada 12-13 November 2011. Penawaran bergabung ke dalam *Trans-pacific Partnership* (TPP) ini ditawarkan kepada 21 negara anggota APEC yang hadir pada KTT-19 tersebut termasuk Indonesia. Dalam penawaran tersebut Indonesia yang diwakilkan oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Gita Wirjawan menyatakan penolakan untuk bergabung pada tanggal 14 November di Hotel Trump Waikiki, Honolulu Amerika Serikat. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan Gita untuk melindungi produk-produk Indonesia karena Indonesia yang telah mengikuti sebanyak 15 perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2010, sehingga perluasan perdagangan bebas dengan standar yang tinggi dengan kawasan Asia dan Pasifik akan menyebabkan akses ekspor-impor Indonesia terlalu luas yang akan mengancam produk dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia.

Keputusan Menteri Perdagangan Indonesia untuk tidak bergabung didukung oleh Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Pakar Perdagangan Internasional, Kelompok Kepentingan Indonesia seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hippmi). Wakil Menteri Keuangan Indonesia Mahendra Siregar menyatakan bahwa untuk perdagangan luar negeri, Indonesia lebih

mengutamakan perdagangan ASEAN²⁵ terbukti dengan keterlibatan Indonesia dengan 15 perjanjian perdagangan bebas ASEAN pada tahun 2010 seperti pada tabel berikut:

Pada pertemuan *Forum Group Discussion* (FGD) yang berjudul “*Trans-pacific Partnership Sebagai Opsi Integrasi Ekonomi Kawasan Asia Pasifik: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*” yang dihadiri oleh Jhon Prasetyo dari *APEC Business Advisory Council* (ABAC), Imam Pambagyo sebagai Direktur Kerjasama ASEAN; Kementerian Perdagangan; Rahmat Pramono, Direktur KSE ASEAN, Kementerian Luar Negeri; Prof. Dr. Lepi Tarmidi, Guru Besar FE-UI; Siswo Pramono, Kapus P2K2 Aspasaf. Huda Bahweres sebagai Asdep VI-Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Regional, Kantor Menko Perekonomian bertindak sebagai moderator dan forum tersebut dibuka oleh Andri Hadi, Plt.²⁶ Kesimpulan yang dihasilkan dalam forum ini adalah membenarkan keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk tidak bergabung pada tahun 2011.

Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi menyatakan Indonesia masih memiliki hambatan-hambatan ekonomi. Hambatan tersebut menurut pandangan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono adalah infrastruktur yang masih rendah dan tidak memadai, peningkatan dalam pelayanan birokrasi, persoalan regulasi dan korupsi yang terjadi di

Indonesia.²⁷ pembukaan pasar yang lebih luas, Indonesia harus menyelesaikan hambatan-hambatan ekonomi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto memandang industri dan perdagangan Indonesia belum bisa memanfaatkan perdagangan bebas sebagai pasar karena masih memenuhi pasar domestik Indonesia yang besar. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur mendukung tindakan pemerintah Indonesia untuk tidak bergabung dalam *Trans-pacific Partnership* (TPP) pada tahun 2011 dengan berpendapat bahwa Indonesia masih mempunyai persoalan ekonomi seperti biaya produksi yang tinggi, biaya logistik yang tinggi, suku bunga kredit perbankan serta energi dan listrik.²⁸ Ketua dan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penolakan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan.

Dalam penawaran keanggotaan perjanjian TPP terhadap Indonesia, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hippmi) Raja Sapta menyatakan bahwa Indonesia harus bisa menyikapi tawaran tersebut dengan baik yang akan berdampak fatal apabila Indonesia bergabung karena Indonesia mempunyai jalur perdagangan yang strategis.²⁹ Indonesia yang masih mempunyai hambatan-hambatan ekonomi dalam negeri akan rugi apabila menerima tawaran

²⁵ Ramdhania El Hida. “*Tolak Obama Masuk “TPP”, RI Kembangkan Ekonomi Dalam Negeri*”. Tersedia di <<http://finance.detik.com/read/2011/11/29/133224/1778127/4/tolak-obama-masuk-tpp-ri-kembangkan-ekonomi-dalam-negeri>> [Diakses tanggal 01 Oktober 2014 pukul 22:13]

²⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “*Trans-pacific Partnership dan Proses Integrasi Ekonomi Kawasan Asia-Pasifik*”. Tersedia di <<http://kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=1052&l=id>> [Diakses pada 12 Desember 2014 pukul 21:17]

²⁷ Esthi Maharani “*Empat Hambatan yang Hadang Ekonomi Indonesia Moncer*” ROL Tersedia di <<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/01/02/1x5lz2-empat-hambatan-yang-hadang-ekonomi-indonesia-moncer>> [Diakses tanggal 09 Desember 2014 pukul 00:07]

²⁸ *Ibid*

²⁹ ASEAN Community Indonesia. “*Indonesia Pastikan Diri Takkan Masuk TPP*”. Tersedia di <<https://aseancommunityindonesia.wordpress.com/2011/11/17/indonesia-pastikan-diri-takkan-masuk-tpp/>> [Diakses pada 12 Desember 2014 pukul 23:55]

perjanjian TPP karena keadaan Indonesia yang strategis namun dengan adanya hambatan-hambatan ketika produk Indonesia tidak mampu bersaing maka Indonesia akan menjadi pasar dengan tingginya nilai impor dibandingkan dengan ekspor.

Simpulan

Perjanjian *Trans-pacific Partnership* (TPP) atau Kemitraan Trans Pasifik merupakan kerangka kerjasama perdagangan bebas di kawasan yang berdekatan dengan laut Pasifik. Perjanjian TPP berawal dari dibentuknya *Pacific Three Closer Economic Partnership* (P3CEP) oleh Chile, Singapura dan Selandia Baru pada diluar pertemuan APEC pada tahun 2002. Pada tahun 2005, anggota P3CEP bertambah dengan bergabungnya Brunei Darussalam sehingga nama P3CEP pun berubah menjadi *Pacific Four* (P4). Perjanjian P4 disepakati dengan MOU Kerjasama Buruh di Wellington. Pada tahun 2008, *Pacific Four* (P4) mendapat tambahan 3 negara anggota yaitu Peru, Australia dan Vietnam sedangkan Amerika Serikat baru mengikuti negosiasinya dan resmi bergabung pada 2009. Pada tahun 2010, Malaysia bergabung dalam P4 sehingga anggota P4 berjumlah 9 negara anggota hingga 2011. Pada tahun 2010 tersebut, P4 berganti menjadi *Trans-pacific Partnership Agreement* (TPP). Selama tahun 2010, perjanjian TPP telah melakukan sebanyak 10 putaran perundingan. Dalam perundingan tersebut membahas mengenai setor-sektor yang diperdagangkan.

Bergabungnya Amerika Serikat dalam perjanjian TPP memberikan dorongan bagi Amerika Serikat untuk mencapai tujuannya di kawasan Asia Pasifik. Perdagangan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik memberikan kontribusi yang melebihi dari setengah total perdagangan Amerika Serikat di dunia. Anggota mitra Perjanjian TPP merupakan 9 negara anggota APEC dari 21 negara anggota APEC. Amerika Serikat

secara aktif menawarkan perjanjian TPP kepada anggota APEC yang belum bergabung termasuk Indonesia pada KTT-19 APEC di Hoonolulu, Hawaii Amerika Serikat. Dalam penawaran tersebut, Presiden Amerika Serikat menjelaskan “*TPP is My Number One Priority*” atau tpp merupakan prioritas nomor satu.

Dalam penawaran keanggotaan untuk bergabung dalam *Trans-pacific Partnership* (TPP), Indonesia menyatakan penolakan oleh Menteri perdagangan Indonesia Gita Wirjawan. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia tersebut, didukung oleh kelompok-kelompok kepentingan Indonesia seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Indonesia mempunyai keterikatan perjanjian bebas dengan *Free Trade Area* yang telah disepakati oleh semua anggota ASEAN.

Hipotesa penulis bahwa Indonesia tidak bergabung dalam perjanjian TPP karena ada diplomasi perdagangan dengan *ASEAN-China Free Trade Agreement*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement*, dan *ASEAN Community* terbukti dengan adanya Forum Diskusi Badan Pengkajian dan Perkembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri yang menghasilkan salah satu kesimpulan alasan Indonesia tidak bergabung dalam perjanjian TPP adalah Indonesia menekankan sentralitas ASEAN.

Daftar Pustaka

- Fergusson, I.F., Vaughn B., *The Trans-Pacific Partnership Agreement*. Congressional Research Service. 12 Desember 2011
- Finnemore M. 1996, “*Interest In International Society*” New York: Cornell University Press
- Hara, Abubakar E., 2011, “*Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme*

- sampai *Konstruktivisme*” Bandung: Penerbit Nuansa
- Hartono Rudi “*Pengaruh Kerjasama ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Pasar Domestik Produk Tekstil Indonesia (2010-2012)*” *ejournal Ilmu Hubungan Internasional* Vol 1 No 4 2013
- ILO Office for Indonesia. 2013 *Analisis Simulasi Social Accounting Matrix (SAM) dan The Smart Model*. Jakarta: ILO
- Mochtar Mas’oed, “*Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*”, LP3ES, Cet.2 (edisi revisi), Jakarta, 1994
- Petri P.A, Plummer M.G, Zhai F. 2012 “*The Trans-Pacific Partnership and Asia-Pacific Integration: A Quantitative Assessment*”. Washington: United Book Press.
- Setiawan Sigit “*ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia dan China*” *Buletin Ilmiah Perdagangan* Vol.6 No.2 Desember 2012
- Anonymous, “*Kemitraan Trans Pasifik, Fokus Utama Forum APEC di Bali*” *Voice of America* 2013. Tersedia di: <<http://www.voaindonesia.com/content/pp-fokus-utama-forum-apec-di-bali/1748844.html>> [Diakses 31 Oktober 2014 pukul 14:30]
- Anonymous, New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade. “*Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : Understanding The P4-The Original Agreement*”. Tersedia di <<http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/Trans-Pacific/0-history.php>> [Diakses pada 15 November 2014 pukul 23:38]
- Hadiedi Prasaja “*Membangun ASEAN Sebagai Kawasan Berdaulat*” *Serikat Petani Indonesia* Tersedia di <<http://www.spi.or.id/?p=4443>> [Diakses tanggal 04 Desember 2014 pukul 12:50]
- Anonymous, *President Obama at The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Tersedia di <<http://www.whitehouse.gov/blog/2011/11/13/president-obama-asia-pacific-economic-cooperation-apec>> [Diakses 21 November 2014 pukul 22:47]
- Anonymous “*Thucydides dan Prinsip Realisme*” Tersedia di <<http://ir.binus.ac.id/2012/08/02/thucydides-dan-prinsip-realisme/>> [Diakses pada 07 Desember 2014]
- Anonymous, New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade. “*Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : Understanding The P4-The Original Agreement*”. Tersedia di <<http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/Trans-Pacific/0-history.php>> [Diakses pada 15 November 2014 pukul 23:38]
- Anonymous, *Tabloid Diplomasi “Diplomasi Perdagangan Multilateral”* Tersedia di <<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/157-juli-2011/1152-diplomasi-perdagangan-multilateral.html>> [Diakses pada 05 Desember 2014 pukul 12:59]
- Anonymous, ILO. “*Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China-Peluang atau Tantangan*” Tersedia di <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_159626.pdf> [Diakses pada 06 Desember 2014 pukul 13:39]
- Anonymous, “*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011*”. Tersedia di <<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/166~PMK.011~2011Per.HTM>> [Diakses pada 02 Desember 2014]
- Anonymous, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “*Perundingan Perdagangan Bebas RI-Selandia Baru Dilanjutkan Maret*” Tersedia di <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/70>>

- 1/Perundingan-Perdagangan-Bebas-RI---Selandia-Baru-Dilanjutkan-Maret>
[Diakses pada 02 Desember 2014 pukul 21:30]
- Anonymous, Tabloid Diplomas. "Perdagangan Indonesia-Australia". Tersedia di <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/169-maret-2012/1367-perdagangan-indonesia-australia.html> [Diakses pada 02 Desember 2014 pukul 17:17]
- Anonymous, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia "Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM Retreat, Lombok, 16-17 Januari 2011" Tersedia di <http://kemlu.go.id/layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseLike.aspx?l=id&ItemId=4a226a31-40bf-4935-bfe7-dc117907def9> [Diakses pada 03 Desember 2014 pukul 01:28]
- Ramdhania El Hida. "Tolak Obama Masuk "TPP", RI Kembangkan Ekonomi Dalam Negeri". Tersedia di <http://finance.detik.com/read/2011/11/29/133224/1778127/4/tolak-obama-masuk-tpp-ri-kembangkan-ekonomi-dalam-negeri> [Diakses tanggal 01 Oktober 2014 pukul 22:13]
- Anonymous, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Trans-pacific Partnership dan Proses Integrasi Ekonomi Kawasan Asia-Pasifik". Tersedia di <http://kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=1052&l=id> [Diakses pada 12 Desember 2014 pukul 21:17]
- Esthi Maharani "Empat Hambatan yang Hadang Ekonomi Indonesia Moncer" ROL Tersedia di <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/01/02/lx5lz2-empat-hambatan-yang-hadang-ekonomi-indonesia-moncer> [Diakses tanggal 09 Desember 2014 pukul 00:07]
- ASEAN Community Indonesia. "Indonesia Pastikan Diri Takkan Masuk TPP". Tersedia di <https://aseancommunityindonesia.wordpress.com/2011/11/17/indonesia-pastikan-diri-takkan-masuk-tpp/> [Diakses pada 12 Desember 2014 pukul 23:55]